

RENCANA KERJA



KECAMATAN BUKI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

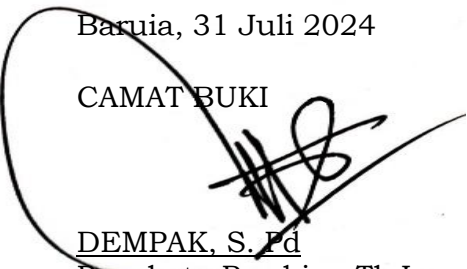
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Buki dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Buki, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Buki masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukkan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Buki dimasa yang akan datang.

Baruia, 31 Juli 2024

CAMAT BUKI



DEMPAK, S. Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19690921 199203 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Buki.....	33
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB V PENUTUP.....	49

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Buki menyusun Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki. Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buki tahun 2024 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memiliki fungsi atribut (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 113);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Kepulauan Selayar guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Buki;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Buki Tahun 2025;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Buki dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buki untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan Buki dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021 – 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun Lalu

Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Buki tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Buki,

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja kecamatan Buki tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.1
Rekapitulasin Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rensrta Kecamatan Buki s/d tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
1	2	3	4		5		6		7		8=5+7		9=8/4x100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	5.575.450.226	0,00	0	70,53	1.955.959.100	0	908.986.809						Belum Tercapai
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	95,00		0,00		88,00		0							Belum Tercapai
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/lapora n perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu (%)	95,00	47.000.000	0,00	0	85,00	17.600.000	0,00%	8.400.000	24,60%	8.400.000	28,94%	17,87%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	5,500,000	0	0	2	2,000,000	1	0	1	0	14,29%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	3	9,000,000	0	0	1	4,450,000	1	3,750,000	1	3,750,000	33,33%	41,67%	KECAMAT AN BUKI	Tercapai

7.01.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	3	8,500,000	0	0	1	2,500,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	3	10,000,000	0	0	1	3,300,000	1	3,300,000	1	3,300,000	33,33%	33,00%	KECAMAT AN BUKI	Tercapai
7.01.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	3	7,000,000	0	0	1	2,900,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	7,000,000	0	0	2	2,450,000	2	1,350,000	2	1,350,000	66,67%	19,29%	KECAMAT AN BUKI	Tercapai
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu (%)	95,00	4.227.240.000	0,00	0	85,00	1.664.776.400	0,00%	809.968.959	23,33%	809.968.959	27,45%	19,16%	KECAMAT AN BUKI	

7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	4,216,740,000	0	0	17	1,660,776,400	9	809,968,959	9	809,968,959	20,00%	19,21%	KECAMATAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3,500,000	0	0	1	2,000,000	1	0	1	0	33,33%	0,00%	KECAMATAN BUKI	Tercapai
7.01.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	7,000,000	0	0	4	2,000,000	2	0	2	0	16,67%	0,00%	KECAMATAN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu (%)	95,00	15.000.000	0,00	0	85,00	3.602.500	0,00%	1.050.000	33,33%	1.050.000	39,22%	7,00%	KECAMATAN BUKI	
7.01.01.2.03 .0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	15,000,000	0	0	2	3,602,500	1	1,050,000	1	1,050,000	33,33%	7,00%	KECAMATAN BUKI	Belum Tercapai

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik (%)	95,00	7.500.000	0,00	0	85,00	2.437.500	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.01.2.05 .0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	7,500,000	0	0	1	2,437,500	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor (%)	95,00	320.210.226	0,00	0	85,00	62.578.000	0,00%	20.008.200	11,46%	20.008.200	13,48%	6,25%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	31,710,226	0	0	2	3,408,000	1	1,168,200	1	1,168,200	8,33%	3,68%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	13,500,000	0	0	4	6,000,000	3	0	3	0	25,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	6,000,000	0	0	1	5,520,000	0	1,440,000	0	1,440,000	0,00%	24,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,200	269,000,000	0	0	400	47,650,000	150	17,400,000	150	17,400,000	12,50%	6,47%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95,00	712.500.000	0,00	0	85,00	151.574.700	0,00%	54.764.650	16,67%	54.764.650	19,61%	7,69%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	24,000,000	0	0	12	13,620,000	6	5,055,750	6	5,055,750	16,67%	21,07%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	688,500,000	0	0	12	137,954,700	6	49,708,900	6	49,708,900	16,67%	7,22%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	95,00	246.000.000	0,00	0	85,00	53.390.000	0,00%	14.795.000	13,10%	14.795.000	15,41%	6,01%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	230,000,000	0	0	9	50,550,000	4	14,655,000	4	14,655,000	19,05%	6,37%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	16,000,000	0	0	4	2,840,000	1	140,000	1	140,000	7,14%	0,88%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai

7.01.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Menit)	8,00	18.468.752	0,00	0	15,00	5.700.000	0	2.550.000						Belum Tercapai
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelengaraan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	95,00	9.000.000	0,00	0	85,00	3.200.000	0,00%	1.650.000	0,00%	1.650.000	0,00%	18,33%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	9,000,000	0	0	1	3,200,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0,00%	18,33%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.02.2.02	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	95,00	9.468.752	0,00	0	85,00	2.500.000	0,00%	900	0,00%	900	0,00%	9,50%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	9,468,752	0	0	1	2,500,000	0	900,000	0	900,000	0,00%	9,50%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100.561.514	0,00	0	100,00	60.571.500	0	8.031.000						Belum Tercapai

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan (%)	95,00	100.561.514	0,00	0	85,00	60.571.500	0,00%	8.031.000	8,33%	8.031.000	9,80%	7,99%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.03.2.01 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	21	5,500,000	0	0	7	2,250,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	95,061,514	0	0	3	58,321,500	1	8,031,000	1	8,031,000	16,67%	8,45%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1,00	25.539.432	0,00	0	1,00	9.272.800	0	3.000.000						Belum Tercapai
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan (%)	100,00	12.000.000	0,00	0	90,00	4.645.400	0,00%	1.500.000	16,67%	1.500.000	18,52%	12,50%	KECAMAT AN BUKI	

7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36	12,000,000	0	0	12	4,645,400	6	1,500,000	6	1,500,000	16,67%	12,50%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan (%)	100,00	13.539.432	0,00	0	90,00	4.627.400	0,00%	1.500.000	16,67%	1.500.000	18,52%	11,08%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	36	13,539,432	0	0	12	4,627,400	6	1,500,000	6	1,500,000	16,67%	11,08%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.05	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	121.312.302	0,00	0	0,00	36.723.000	0	5.700.000						Tercapai
7.01.05.2.01	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	100,00	121.312.302	0,00	0	90,00	36.723.000	0,00%	5.700.000	8,33%	5.700.000	9,26%	4,70%	KECAMAT AN BUKI	

7.01.05.2.01 .0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	900	105,000,000	0	0	300	31,023,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.05.2.01 .0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	150	16,312,302	0	0	5	5,700,000	25	5,700,000	25	5,700,000	16,67%	34,94%	KECAMAT AN BUKI	Tercapai
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70,00	33.590.221	0,00	0	60,00	17.950.000	0	8.592.000						Belum Tercapai

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	100,00	33.590.221	0,00	0	80,00	17.950.000	0,00%	8.592.000	11,11%	8.592.000	13,89%	25,58%	KECAMAT AN BUKI	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	3	6,000,000	0	0	1	4,150,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	3	27,590,221	0	0	1	9,700,000	1	8,592,000	1	8,592,000	33,33%	31,14%	KECAMAT AN BUKI	Tercapai
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	0	0	0	1	4,100,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMAT AN BUKI	Belum Tercapai

memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan,.

a. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain adalah :

- Masa/waktu Pelaksanaan
- Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pemerintah Kecamatan
- Kerja Sama dengan Masyarakat
- Perencanaan yang baik

b. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain adalah:

- Kurangnya Pegawai
- Letak Geografis Kecamatan Buki
- Pembiayaan
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat karena sibuk mencari nafkah akibat ekonomi yang semakin sulit
- Perencanaan yang kurang baik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Wilayah Kecamatan Buki terdiri dari 7 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Buki lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Kabupaten Kepulauan Selayar

No	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+2)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Peningkatan Pelayanan di tingkat Kecamatan	20 menit	15 menit	10 menit	8 menit	20 menit		15 menit	10 menit	Target Tercapai
	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pmbangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Target Tercapai
	Persentase Kasus Kriminalitas di tingkat Kecamatan	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,3 %		1,00 %	1,00 %	Melebihi Target
	Persentase konflik Sosial dan keagamaan di tingkat Kecamatan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	Target Tercapai
	Persentase Program Pemerintahan Desa yang mendukung Program Pemerintah	45 %	50%	55 %	60 %	87,6%		60 %	65 %	Melebihi Target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buki bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Buki untuk cukup baik terlihat dari capaian indikator peningkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai yaitu 20 Menit untuk tahun 2023.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan .

- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan Buki sebagai penjabaran visi misi kabupaten Kepulauan Selayar.
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sudah termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Buki dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Buki

Program dan kegiatan berdasarkan Kecamatan Buki usulan analisis tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Buki Tahun 2025. Program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang menjadi Program dan Rencana Kerja Kecamatan Buki adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama OPD : Kecamatan Buki

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					catatan
Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec.Buki	71,51	1,960,234,445	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec.Buki	71,51	2,215,430,844	
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		91			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		91		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	85%	17,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	85%	17,500,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	3,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LPPD dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LPPD dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 laporan	2,500,000	
Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		90%	1,410,080,000	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		90%	1,665,276,400	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 Orang/ Bulan	1,405,580,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 Orang/ Bulan	1,660,776,400	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	1.000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	1.000,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	1.000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	1.000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 Laporan	1,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu		90%	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu		90%	10.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD		1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD		1 Dokumen	2.000.000	

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	3.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Laporan	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Kantor		85%	35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Kantor		85%	35.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1 Dokumen	2.500.000	
Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	2.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		1 Orang	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor		90%	109,654,444	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor		90%	109,954,444	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	1.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan		1 paket	7,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan		1 paket	7,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan		4 Paket	10,454,444	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan		4 Paket	10,454,444	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4 Dokumen	4,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4 Dokumen	4,500,000	

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1 Laporan	2.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 laporan	85,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 laporan	85,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah		85%	49.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah		85%	49.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	20,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	20,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	4,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	4,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		2 Unit	25,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		2 Unit	25,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	243,500,001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	250,500,000	
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat		12 laporan	2,500,000	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat		12 laporan	2,500,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan		12 laporan	8,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan		12 laporan	14,000,000	
Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan		12 laporan	233,000,001	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan		12 laporan	234,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	85,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	85,500,000	
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya		7 Unit	79.000.000	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya		7 Unit	79.000.000	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		5 Unit	3,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		5 Unit	3,500,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	3,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	3,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		10 Menit	12,767,877	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		10 Menit	12,767,877	Prioritas
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan		90%	6,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan		90%	6.000.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertiaki Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 laporan	3,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertiaki Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 laporan	5.000.000	
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	3,000,000	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	5.000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang Di selenggarakan		90%	3,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang Di selenggarakan		90%	3.000.000	
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah kecamatan		1 laporan	3,000,000	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah kecamatan		1 laporan	3.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan		90%	3,767,877	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan		90%	3,767,877	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1 Dokumen	1,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1 Dokumen	1,000,000	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan		1 laporan	2,767,877	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan		1 laporan	2,767,877	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterpenuhan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	33,515,678	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterpenuhan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	52,000,000	Prioritas
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		90%	33,515,678	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		90%	52,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		7 Lembaga	2,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		7 Lembaga	2.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kagiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		1 Laporan	31,515,678	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kagiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		1 Laporan	50,000,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat kecamatan		1%	8,511,918	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat kecamatan		1%	8,511,918	Prioritas
Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		95%	4.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		95%	4.000.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	4.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	4.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		95%	4,511,918	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		95%	4,511,918	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		12 laporan	4,511,918	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		12 laporan	4,511,918	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial Keagamaan di tingkat kecamatan		0%	40,431,611	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial Keagamaan di tingkat kecamatan		0%	40,431,611	Prioritas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan		95%	40,431,611	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan		95%	40,431,611	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		300 orang	35,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		300 orang	40.000.000	
Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local,regional dan nasional		50 Orang	5,431,611	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local,regional dan nasional		50 Orang	7,000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Urusan Pemeritahan Desa yang mendukung program pemerintah		65%	16,427,852	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Urusan Pemeritahan Desa yang mendukung program pemerintah		65%	18,000,000	Gerbangsari
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di fasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan		90%	15,427,852	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di fasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan		90%	18,000,000	
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan	Jumlah yang doifasilitasi dalam rangka pengelolaan		1 dokumen	1,000,000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah yang doifasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan		1 dokumen	2.000.000	

Pendayagunaan Aset Desa	keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Desa	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	2,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	2.500.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa (Dokumen)		1 dokumen	2,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		1 dokumen	2.500.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	9,427,852	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	11,000,000	
Jumlah				2,070,889,381	Jumlah				2,361,010,639	

Baruia, 31 Juli 2024
CAMAT BUKI


DEMPAK S Pd
Pangkat : Pembina
NIP. 19690921 199203 1

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki sebagai unsur penunjang pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Buki tahun 2024. Berikut ini akan disajikan pada tabel 2.5

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama PD : Kec. Buki

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran\Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Jalan	Desa Kohala	Panjang Jalan di bangun	±200 M	
2	Rehabilitasi jalan	Desa :Buki Timur, Lalang Bata, Kohala, Balng Butung, Bonto Lempangan, Mekar Indah, Buki	Panjang Jalan yang direhabilitasi	±40.856 M	
3	Pembangunan Jembatan	Desa Buki	Jumlah jembatan Yang di bangun	1 Jembatan	
4	Reahabilitasi Jembatan	Desa Lalang Bata	Jumlah jembatan Yang direhabilitasi	1 Jembatan	
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Desa Buki Timur	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	±100 M	
6	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Desa Buki	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dibangun	±600 M	

7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Desa Bontolempangan, Desa Buki	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	6 titik	
8	Pembangun Sistem Drainase Lingkungan	Desa Balang Butung	Panjang saluran Drainase yang dibangun	±2.200 M	
9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa: Buki Timur, Mekar Indah,	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3 Unit	
10	Pembangunan Fasilitas Parkir sekolah	Desa Balang Butung	Jumlah Fasilitas Parkir yang telah dibangun	1 Unit	
11	Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan Komunikasi publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Desa Buki Timur	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan Komunikasi publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha Nelayan skala Kecil	Desa Mekar Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha Nelayan skala Kecil	1 Unit	

Baruia, 31 Juli 2024

CAMAT BUKI

DEMPAK, S.Pd

Pangkat : Pamaha

NIP. 19670312 199203 1 004

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada Tabel berikut

Tabel 3.1

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULSEL	PRIORITAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peningkatan investasi sektor unggulan daerah Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasisi potensi desa
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;	Peningkatan derajat hidup manusia yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Buki

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Buki adalah :

- Meningkatkan kualitas sistem perencanaan di SKPD agar penyusunan dokumen perencanaan dapat tepat waktu sehingga penyediaan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan dapat memadai dan berkualitas sehingga dapat mendukung kelancaran perencanaan di tingkat Kabupaten;
- Meningkatkan kerjasama antar bagian di Kecamatan Buki dalam hal pembuatan perencanaan sehingga terciptanya suasana kerja yang sinergis dan harmonis untuk menciptakan suatu bentuk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di tentukan.
- Meningkatkan Pelayanan dengan mengefesienkan dan mengefektifkan waktu dalam memberikan pelayanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten demi terwujudnya visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar serta dampaknya terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (Development Goals) .

Secara garis besar, uraian program/kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD : Kecamatan Buki

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
70101					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec. Buki	71,51	1,943,212,700			70,53%	1.960.005.638
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		91				88%	
7	01	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	90%	14,100,000	3		95%	16.500.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1,500,000	3		2 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,850,000	3		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,850,000	3		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2,700,000	3		1 Dokumen	3.500.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2,700,000	3		1 Dokumen	2.500.000

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	2,100,000	3		1 laporan	2,50,000
7	01	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		90%	1,663,476,400	3		95%	1,409,080,000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 orang/ Bulan	1,660,776,400	3		17 orang/ Bulan	1,405,580,000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	900,000	3		1 Laporan	500,000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Dokumen	1,800,000	3		4 Dokumen	1,000,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	90%	2.550.000	3		95%	11.000.000

7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	2.550.000	3		1 Laporan	6.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki Predikat kinerja sangat baik	Kec.Buki	90%	1.800.000,00	3		95%	8.000.000
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1.800.000,00	3		1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kec.Buki	90%	52.172.000,00	3		95%	124.425.638
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	3,316.000	3		4 Paket	11.225.638
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	6,000,000	3		4 Dokumen	4.500.000
7	01	01	2.03	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1 Laporan	5.520.000	3		1 Laporan	2.000.000
7	01	01	2.03	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 laporan	37,336,000	3		400 laporan	99.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah		90%	9.181.300			90%	51.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		1 Unit	9.181.300			1 Unit	25.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Buki	90%	145.323.000	3		95%	250.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	13,620,000	3		12 laporan	8.000,000
7	01	01	2.08	0004	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	131,703,000	3		12 laporan	239.500.000

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec.Buki	90%	59,610,000	3		100%	90.000,000
7	01	01	2.09	0002	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	57.500.000	3		7 Unit	80.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	2,110,000	3		3 Unit	5,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		10 Menit	4.500.000	3	Prioritas	10 menit	13.072.519
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	Kec.Buki	100%	2.250.000	3		100%	6,000,000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 dokumen	2.250.000	3		1 dokumen	3.000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggaran (%)	Kec.Buki	90%	2.250.000	3		100%	3.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 laporan	2.250.000	3		1 laporan	3.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)		100%	36.760,000	3	Prioritas	100%	34.315.362
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan (%)	Kec.Buki	90%	36.760,000	3		100%	34.315.362
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	3		7 lembaga Kemasyarakatan	2.000.000

7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	34,650,000	3		2 laporan	32.315.362
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)		1%	8.100.000	3	Prioritas	1%	8.715.013
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)		95%	4.050.000	3		90%	4.000.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	4.050.000	3		12 laporan	4.000.000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		95%	4.050.000	3		90%	4,715.013
7	01	04	2.03	0001	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 laporan	4.050.000	3		12 laporan	4,715.013
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)		0%	30,760,500	3	Prioritas	0%	41.396.310
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)		95%	30,760,500	3		90%	41.396.310
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memamtapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		300 orang	23.364.000	3		300 orang	36.000.000

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanKerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		50 Orang	6.396.500	3		50 orang	5.396.310
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)		65%	17.278.800	3	Gerbang sari	60%	14.095.960
7	01	06	2.01		Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	Persentase Keterpenuhan Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		90%	17.278.800	3		80%	14.095.960
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	3.783.300			1 Dokumen	1,500,000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	9.700.000	3		1 dokumen	9,095.960
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		12 Laporan	3.795.500			12 Laporan	0,00
JUMLAH									2.045.602.000				2.071.600.802

Barua, 31 Juli 2024
CAMAT BUKI

DEMPAK, S. Pd
Rangkat : Pembina
NIP. 19670312 199203 1 004

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan, dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan pada Kecamatan Buki untuk tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
70101					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec. Buki	71,51	1,943,212,700			70,53%	1.960.005.638
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		91				88%	
7	01	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	90%	14,100,000	3		95%	16.500.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1,500,000	3		2 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,850,000	3		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,850,000	3		1 Dokumen	3.000.000

7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2,700,000	3		1 Dokumen	3.500.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2,700,000	3		1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	2,100,000	3		1 laporan	2,50,000
7	01	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		90%	1,663,476,400	3		95%	1,409,080,000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 orang/ Bulan	1,660,776,400	3		17 orang/ Bulan	1,405,580,000
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0			0 Dokumen	1,500,000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	900,000	3		1 Laporan	500,000
7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	3		1 Dokumen	500,000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Dokumen	1,800,000	3		4 Dokumen	1,000,000

7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kec.Buki	90%	2.550.000	3		95%	11.000.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD		0 Dokumen	0	3		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	0	3		1 Laporan	3.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	2.550.000	3		1 Laporan	6.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki Predikat kinerja sangat baik	Kec.Buki	90%	1.800.000,00	3		95%	8.000.000
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen	0,00			1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1.800.000,00	3		1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	0			1 Orang	3.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kec.Buki	90%	52.172.000,00	3		95%	124.425.638
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0			1 paket	700.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan		0 paket	0			1 paket	7.000.000

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	3,316.000	3		4 Paket	11.225.638
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	6,000,000	3		4 Dokumen	4.500.000
7	01	01	2.03	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1 Laporan	5.520.000			1 Laporan	2.000.000
7	01	01	2.03	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 laporan	37,336,000	3		400 laporan	99.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah		90%	9.181.300			90%	51.000.000
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	0,00			1 unit	22.000.00 0,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		1 Unit	9.181.300			1 Unit	25.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Buki	90%	145.323.000	3		95%	250.000.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	13,620,000	3		12 laporan	8.000,000
7	01	01	2.08	0004	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	131,703,000	3		12 laporan	239.500.000

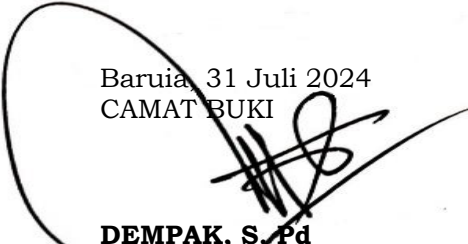
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec.Buki	90%	59,610,000	3		100%	90.000,000
7	01	01	2.09	0002	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	57.500.000	3		7 Unit	80.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	2,110,000	3		3 Unit	5,000,000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0,00			1 unit	5,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		10 Menit	4.500.000	3	Prioritas	10 menit	13.072.519
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	Kec.Buki	100%	2.250.000	3		100%	6,000,000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0 laporan	0,00	3		1 laporan	3,000,000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 dokumen	2.250.000	3		1 dokumen	3.000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggaran (%)	Kec.Buki	90%	2.250.000	3		100%	3.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 laporan	2.250.000	3		1 laporan	3.000.000

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan (%)	Kec.Buki	90%	0,00	3		100%	4.072.519
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0,00			1 Dokumen	1.500.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan		0 laporan	0,00	3		1 laporan	2.572.519
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)		100%	36.760,000	3	Prioritas	100%	34.315.362
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan (%)	Kec.Buki	90%	36.760,000	3		100%	34.315.362
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	3		7 lembaga Kemasyarakatan	2.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	34,650,000	3		2 laporan	32.315.362
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)		1%	8.100.000	3	Prioritas	1%	8.715.013
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)		95%	4.050.000	3		90%	4.000.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	4.050.000	3		12 laporan	4.000.000

7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		95%	4.050.000	3		90%	4,715.013
7	01	04	2.03	0001	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 laporan	4.050.000	3		12 laporan	4,715.013
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)		0%	30,760,500	3		0%	41.396.310
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)		95%	30,760,500	3		90%	41.396.310
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memamtapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		300 orang	23.364.000	3		300 orang	36.000.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanKerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		50 Orang	6.396.500	3		50 orang	5.396.310
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik social sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan		0 Laporan		0,00		0 Laporan	0,00

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)		65%	17.278.800	3	Gerbang sari	60%	14.095.960
7	01	06	2.01		Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	Persentase Keterpenuhan Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		90%	17.278.800	3		80%	14.095.960
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah yang doifasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0 dokumen	0,00	3		1 dokumen	2.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	3.783.300			1 Dokumen	1,500,000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0 dokumen	0,00			0 Dukumen	0,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa (Dokumen)		0 dokumen	0,00	3		1 dokumen	1,500,000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	9.700.000	3		1 dokumen	9,095.960
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		12 Laporan	3.795.500			12 Laporan	0,00
JUMLAH									2.045.602.000				2.071.600.802

Baruia, 31 Juli 2024
CAMAT BUKI



DEMPAK, S. Pd
Pangkat : Pembina
NIP. 19670312 199203 1 004

BAB V

Penutup

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Buki Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Buki wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Buki ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Buki Tahun 2025.

Baruia, 31 Juli 2024

CAMAT BUKI,



DEMPAK, S. Pd

Pangkat : Pembina

NIP. 19670312 199203 1 004